

EVALUASI PENERAPAN SAK ETAP ATAS PERSEDIAAN (STUDI KASUS PADA PT. WKPI)

Ni Luh Putu Kristayani¹
Ni Putu Sri Harta Mimba²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: niluhputukristayani@yahoo.com / *telp* : +62 85 792 623 748

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Persediaan adalah hal penting bagi perusahaan manufaktur. Persediaan memerlukan pengelolaan, pencatatan, dan penilaian persediaan yang tepat, sehingga perusahaan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi evaluasi dan pengendalian intern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan SAK ETAP atas persediaan pada UMKM yang dalam hal ini adalah perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang tergolong ke dalam usaha berskala menengah, yaitu PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI) yang berada di Kota Denpasar. Dalam penelitian ini, jenis datanya adalah data kuantitatif serta data kualitatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, akuntansi persediaan pada PT. WKPI telah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian itu tercermin dari perbandingan dan pengukuran persediaan PT. WKPI dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan pada SAK ETAP.

Kata kunci: *persediaan, PT. WKPI, SAK ETAP, UMKM*

ABSTRACT

Inventories are essential for manufacturing companies. Inventory requires management, record keeping, and proper inventory valuation, so the company can provide useful information for the evaluation and internal control. The purpose of this study is to evaluate the suitability of SAK ETAP implementation of the inventory on SMEs which in this case is a manufacturing company.

This research was conducted at the manufacturing company belonging to the medium-scale enterprises, namely Wisnu Karya Putra International Ltd. (WKPI Ltd.) in the city of Denpasar. Data used in this study is qualitative and quantitative data. The data source of this research is secondary data. The data collection was done by using documentation. The data analysis technique used is the analysis of qualitative data. Based on the evaluation found that the accounting for inventories at WKPI Ltd. has been in accordance with SAK ETAP applicable in Indonesia.

Keywords: *inventory, PT. WKPI, SAK ETAP, SMEs*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara (Fatoki, 2012). UMKM mendominasi sebanyak 99% dari jenis usaha yang ada di seluruh dunia (Kureshi dan Sajid, 2009). UMKM merupakan kekuatan penting dalam ekonomi berbasis informasi modern (Mitchell dan Reid, 2000), dikatakan demikian karena memiliki berbagai keunggulan, yaitu fleksibel; pencipta lapangan kerja; dan memiliki diversifikasi yang luas (Narsa,dkk. 2012). Hal serupa juga dikatakan oleh Strouhal, et al. (2009), bahwa UMKM adalah jenis usaha yang lebih fleksibel dan memiliki kreativitas yang inovatif sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan usaha besar.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi karena berperan sebagai penyedia barang dan jasa perantara untuk perusahaan besar (Padachi, 2012). Sebagian besar negara-negara maju yang memberi perhatian lebih untuk UMKM telah mengalami penurunan tingkat pengangguran yang signifikan (Asalou, 2004). Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan (Tambunan, 2012:51).

Untuk memperoleh kredit guna menambah modal usaha ataupun untuk pembayaran pajak, UMKM harus menyerahkan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, UMKM dihadapkan pada masalah kompleksitas penerapan pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Jika diterapkan, maka diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar

bagi UMKM (Suhairi, 2004). Menurut Briciu et al. (2009) standar untuk penyusunan laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan adanya fenomena tersebut, maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyikapinya melalui penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Dibandingkan dengan SAK Umum, SAK ETAP memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, diantaranya adalah: (a) UMKM dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, (b) lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam implementasinya, (c) dapat diaudit dan mendapatkan opini audit sehingga dapat digunakan untuk memperoleh dana guna mengembangkan usaha, dan (d) kehandalan informasi pada penyajian laporan keuangan (Tim Implementasi IFRS, 2011). Lahirnya standar ini bisa menjadi pedoman yang lebih sederhana dan mudah dimengerti bagi kalangan luas untuk menyusun laporan keuangan yang secara umum bisa diterima (Sariningtyas dan Diah, 2011).

Melihat pentingnya penerapan SAK ETAP bagi UMKM, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai SAK ETAP. Penelitian di bidang ini relatif masih sedikit, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP pada UMKM. Namun, karena keterbatasan waktu, maka penelitian ini dilakukan dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu menggunakan salah satu dari jenis usaha yang tergolong ke dalam UMKM, karena entitas tanpa akuntabilitas publik secara umum merupakan UMKM, maka penerapan SAK ETAP lebih didominasi oleh UMKM (Basir, 2010).

PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI) merupakan salah satu dari empat perusahaan manufaktur pengekspor produk kayu yang ada di Bali, yang membedakan PT. WKPI dengan usaha sejenis adalah semua produk dan kemasan kayu menerapkan standar ISO ISPM #15 IPPC FAO sehingga kualitas produk yang dihasilkan terjamin mutunya. PT. WKPI telah mampu untuk mengekspor produk-produknya ke semua negara pembeli, hal ini tidak lepas dari kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah lokal untuk dapat mengikuti standar internasional untuk menjadi pemain di pasar global dengan memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI) adalah perusahaan kayu yang dapat dikategorikan sebagai usaha menengah dimana PT. WKPI merupakan perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik (perusahaan tertutup) sehingga cocok untuk menerapkan SAK ETAP. Persediaan yang dimiliki oleh PT. WKPI dapat digolongkan menjadi dua macam persediaan, yaitu persediaan olahan kayu dan persediaan kemasan kayu yang bersumber dari kayu legal yang memiliki sertifikat resmi. PT. WKPI telah memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan PT. WKPI telah memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pelaksanaan SVLK di perusahaan kayu lainnya yang ada di Bali.

Melihat keunikan dari persediaan yang dimiliki oleh PT. WKPI, maka peneliti bermaksud untuk menjadikan pencatatan persediaan dari perusahaan ini sebagai obyek penelitian. Terdapat berbagai penelitian yang melakukan kajian mengenai evaluasi penerapan SAK ETAP pada UMKM, dimana menurut Abdul (2012) tingkat profitabilitas dari UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya

penerapan pencatatan akuntansi yang memadai. European Commission (2008) menyatakan bahwa informasi akuntansi yang tepat adalah penting untuk keberhasilan pengelolaan setiap badan usaha baik besar ataupun kecil. Menurut Maseko dan Manyani (2011) sistem akuntansi menyediakan sumber informasi untuk pemilik dan manajer UMKM yang beroperasi di industri apapun untuk digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan.

Fitakhurrokhmah (2013) menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan SAK ETAP. Sian dan Roberts (2009) menyatakan bahwa usaha UMKM yang berada di Inggris dibingungkan dengan standar pencatatan akuntansi yang begitu rumit karena kompleksitas informasi yang diberikan, sehingga mereka membutuhkan pedoman pencatatan yang diperuntukkan bagi UMKM. Menurut Van Wyk dan Rossouw (2009) pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang diatur penuh pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) umum tidak menghasilkan biaya-efektif dan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan UMKM.

Menurut Setiady (2012) sebagian besar UMKM yang siap menerapkan SAK ETAP adalah perusahaan yang telah memiliki sistem akuntansi yang cukup rapi dan tertata. Menurut Bertoni dan Rosa (2010) pengenalan standar pencatatan baru untuk entitas kecil dan menengah (UMKM) memiliki efek harmonisasi pelaporan keuangan bagi semua perusahaan terdaftar. Menurut Auliyah (2012) pengenalan dan pelatihan tentang akuntansi dan SAK ETAP dapat menjadi wadah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Menurut Kristanto (2011) UMKM harus menerapkan SAK ETAP dengan baik, sehingga dapat meningkatkan

kemampuan, ketrampilan, dan manajemen khususnya bidang keuangan serta dapat meningkatkan hasil dan kualitas kerja dalam rangka meningkatkan penghasilan para pelaku UMKM.

Menurut Tanugraha (2012) laporan keuangan PT. TDMN sudah memadai karena pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan SAK ETAP, tetapi tidak lengkap karena laporan keuangan tersebut hanya digunakan untuk pelaporan pajak perusahaan, hal itu menyebabkan tidak dapat diketahui aktivitas operasi dari laporan keuangan masing-masing akun. Menurut Rico dan Lumban (2008) PT. Electronic City Indonesia Cabang Medan telah menerapkan PSAK no. 14 dalam sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Simanjuntak dan Pentus (2003) PT. Nanyang Indokarya Lubuk Pakam telah menerapkan PSAK namun masih ada penyimpangan. Menurut Rajeev (2008) manajer atau pengelola UMKM harus mempertimbangkan tentang pencatatan persediaan sebagai konsep strategis, karena pencatatan persediaan yang efektif berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha.

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan SAK ETAP pada PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI) khususnya kesesuaian penerapan akuntansi persediaan dengan SAK ETAP. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) dalam SAK ETAP mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan dengan ruang lingkup mengatur pengukuran dan pengakuan persediaan. Persediaan adalah: (a) pada kegiatan normal, untuk dijual; (b) yang digunakan dalam produksi berupa bahan atau perlengkapan; atau (c) sedang berada dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Berlaku bagi seluruh jenis

persediaan, kecuali: (a) efek tertentu; (b) dalam kontrak konstruksi berupa persediaan dalam proses (*work in progress*) termasuk kontrak dalam bentuk jasa yang secara langsung berhubungan.

Pengukuran persediaan dalam SAK ETAP (IAI, 2009) menerangkan bahwa biaya perolehan persediaan adalah keseluruhan dari biaya pembelian, kemudian biaya konversi, serta biaya lainnya yang menjadikan persediaan pada keadaan dan tempat sekarang. Besarnya nilai persediaan diukur dari manakah nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual yang kemudian dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.

Entitas harus menentukan biaya persediaan, selain yang terkait dengan semua biaya pembelian, kemudian biaya konversi, serta biaya lainnya yang menjadikan persediaan pada keadaan dan tempat sekarang, dengan menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang atau masuk-pertama keluar-pertama (MPKP). Persediaan yang sifat serta penggunaannya berbeda dapat menggunakan rumus biaya yang berbeda.

Biaya persediaan diukur menggunakan identifikasi khusus atas biayanya secara tersendiri bagi persediaan yang secara normal tidak bisa ditukarkan, dan jasa maupun barang yang dihasilkan serta dipisahkan untuk proyek tertentu. Untuk seluruh persediaan dengan sifat dan penggunaan yang sejenis, harus menggunakan rumus biaya yang sama. Metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP) tidak diperbolehkan dalam SAK ETAP. Jika terjadi penurunan nilai persediaan, persediaan harus diukur pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, serta mengakui kerugian dari adanya penurunan nilai.

Paragraf tersebut dalam beberapa kondisi juga mengatur pemulihan penurunan nilai sebelumnya.

Apabila persediaan dijual, jumlah yang tercatat dinyatakan dimana pendapatan yang terkait diakui sebagai beban periode. Terdapat persediaan yang bisa dipindahkan ke dalam aset lainnya, contohnya sebagai bagian dari aset tetap yang dibangun sendiri. Pemindahan persediaan ke aset lainnya dinyatakan sebagai beban selama umur manfaat aset bersangkutan.

Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut: (a) kebijakan akuntansi yang dipergunakan mengukur persediaan, serta rumus biaya yang dipergunakan; (b) keseluruhan jumlah persediaan yang tercatat serta penggolongan yang sesuai dengan entitas; (c) besarnya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode; (d) besarnya penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diterangkan dalam laporan laba rugi sesuai dengan bab mengenai penurunan nilai aset pada SAK ETAP; (e) jumlah tercatat persediaan yang dipergunakan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan usahanya dengan menjalankan usaha yang memenuhi standar-standar yang berlaku, baik dalam hal pelaksanaan produksi maupun pencatatan keuangannya, terutama mengenai persediaan yang merupakan aktiva lancar terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini adalah di PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI) yang beralamat di Jalan Raya Sesetan I no. 18 Denpasar-Bali. Obyek

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah persediaan dari PT. Wisnu Karya Putra Internasional (WKPI). Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis persediaan dimana terdapat tiga macam persediaan, yaitu persediaan berupa bahan baku, persediaan berupa barang dalam proses, dan persediaan berupa barang jadi. Biaya persediaan adalah biaya perolehan persediaan yaitu biaya pembelian, biaya konversi serta biaya lain yang menjadikan persediaan ke lokasi serta keadaan saat ini. Pencatatan persediaan yang terdiri atas dua sistem pencatatan, yaitu secara periodik dan secara perpetual. Penilaian persediaan dapat didasarkan pada harga pokok dan selain dari harga pokok.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu gambaran umum dari PT. WKPI, serta data kuantitatif yaitu data mengenai catatan akuntansi persediaan dari PT. WKPI. Sumber data penelitian berupa data sekunder yaitu data akuntansi yang berhubungan dengan catatan persediaan dari PT. WKPI. Metode pengumpulan data penelitian berupa dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan terdiri dari mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan/verifikasi data (Miles dan Huberman, 2007:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persediaan yang dimiliki atau merupakan aset dari PT. WKPI adalah dalam bentuk bahan baku berupa kayu gergajian yang kemudian digunakan pada proses produksi untuk dijual setelah menjadi barang jadi berupa kemasan kayu dan produk olahan kayu. Persediaan bahan baku PT. WKPI adalah sebesar

63,40%, persentase persediaan barang dalam proses adalah sebesar 19,63%, dan persentase persediaan barang jadi adalah sebesar 16,97% dari total keseluruhan persediaan yang dimiliki perusahaan. Jumlah persediaan PT. WKPI dapat dilihat dalam neraca periode 2012 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.
Neraca (Sebagian) PT. WKPI Per 31 Desember 2012

PT Wisnu Karya Putra Internasional	
Neraca (Sebagian)	
Per 31 Desember 2012	
ASET	
ASET LANCAR	
Kas	Rp. 12.300.000
Bank	Rp. 40.000.000
Piutang Usaha	Rp. 49.400.000
Piutang Karyawan dan Pemilik	Rp. 28.379.102
Persediaan:	
Barang Mentah	Rp.105.000.000
Barang Setengah Jadi	Rp. 32.500.000
Barang Jadi	Rp. 28.105.275
Lainnya	-
Total Aset Lancar	Rp.295.684.377

Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam SAK ETAP mengenai ruang lingkup persediaan.

Biaya-biaya yang mempengaruhi biaya pembelian persediaan pada PT. WKPI diantaranya adalah biaya untuk pembelian, konversi, dan biaya lain-lain. Biaya konversi memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan biaya pembelian dan biaya lain-lain, karena biaya konversi adalah biaya yang langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi. Hal ini telah sesuai dengan prinsip mengenai biaya persediaan yang dijabarkan pada SAK ETAP, yaitu mencakup

seluruh biaya yang menjadikan persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang. Berikut adalah perhitungan dari biaya produksi PT. WKPI periode 2012:

Tabel 2.
Perhitungan Biaya Produksi PT. WKPI

Biaya Bahan Baku:	
Persediaan awal	Rp. 125.000.000
Pembelian Bahan Baku	Rp. 930.140.000
Biaya Angkut Pembelian Bahan	Rp. 36.891.350
Bahan baku tersedia dipakai	Rp.1.092.031.350
Persediaan akhir	Rp. 105.000.000
Bahan baku dikonsumsi	Rp.987.031.350
Biaya Tenaga kerja Langsung	Rp.384.000.000
Biaya Overhead Pabrik:	
Bahan Pembantu	Rp.144.881.190
Biaya Pemeliharaan/Perbaikan	Rp. 48.293.730
Biaya Lain-lain Pabrik	Rp. 48.293.730
Jumlah Biaya Overhead Pabrik	Rp.241.468.650
Jumlah Biaya Produksi	Rp.1.612.500.000

PT. WKPI menggunakan metode pencatatan perpetual. Untuk tujuan pengawasan persediaan, sistem perpetual dinilai lebih baik dibandingkan dengan sistem periodik. Dengan sistem perpetual, perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan sewaktu-waktu tanpa perlu menunggu hingga akhir periode dan tetap melakukan *stock opname* untuk memverifikasi keakuratan data persediaan yang diperoleh dari metode perpetual.

Metode penilaian yang dilakukan oleh PT. WKPI telah sesuai dengan rumus biaya yang diperkenankan oleh SAK ETAP untuk mengukur nilai

persediaan. PT. WKPI melakukan penilaian persediaan didasarkan pada harga pokok dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP)/FIFO (*First In First Out*) sistem perpetual, dimana persediaan yang dibeli pertama, terlebih dahulu dijual atau dipergunakan sehingga persediaan akhir adalah yang dibeli kemudian. PT. WKPI memilih menggunakan metode FIFO karena dapat mendekatkan biaya berjalan dengan nilai persediaan akhir. Barang yang dibeli pertama kali merupakan barang pertama yang akan dikeluarkan, hal ini menjadikan pembelian paling akhir sebagai nilai persediaan, terutama pada saat laju perputaran persediaan cepat sehingga lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Berikut adalah contoh kalkulasi biaya persediaan dengan metode MPKP/FIFO dari PT. WKPI:

Tabel 3.
Kalkulasi Biaya Persediaan bahan baku kayu jati metode MPKP/FIFO PT. WKPI

TGL	PEMBELIAN			PENJUALAN			SALDO PERSEDIAAN			
	UNIT (m ³)	BIAYA /m ³	TOTAL BIAYA	UNIT (m ³)	BIAYA /m ³	TOTAL BIAYA	UNIT (m ³)	BIAYA /m ³	TOTAL BIAYA	
Sep 2013	1						0.0164*	\$350	\$5.74	
	3	1	\$400	\$400			0.0164	\$350	\$5.74	
							1	\$400	\$400	
	6				0.0164	\$350	\$43.19			
					0.1070	\$400	\$42.80	0.893	\$400	\$357.2
	20	2	\$375	\$750				0.893	\$400	\$357.2
								2	\$375	\$750
	27				0.893	\$400	\$357.2			
					0.1942	\$375	\$72.825	1.8058	\$375	\$677.175
	28	1	\$450	\$450				1.8058	\$375	\$677.175
		Persediaan Akhir						1	\$450	\$450
										\$1,127.175
	Harga Pokok Penjualan									
							\$516.015			
	*Persediaan Awal									

Bila biaya penggantian persediaan lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang tercatat serta persediaan pada harga jual normal tidak dapat dijual karena cacat, usang, atau penyebab lainnya, maka persediaan PT. WKPI dinilai menggunakan metode nilai terendah antara harga pokok atau harga pasar (*lower of*

cost market method – LCM) karena dengan metode ini laba kotor (dan laba bersih) dalam periode terjadinya penurunan nilai pasar akan berkurang jumlahnya.

Berikut ilustrasinya:

Tabel 4.
Penentuan Nilai Persediaan dengan Metode LCM

KOMODITAS	KUANTITAS PERSEDIAAN (m ³)	BIAYA PER m ³	HARGA PASAR PER m ³	TOTAL		
				BIAYA	PASAR	LEBIH RENDAH BIAYA/PASAR
Kayu Kelapa	5	\$ 170	\$ 150	\$ 850	\$ 750	\$ 750
Kayu Bangkirai	1.5	\$ 800	\$ 870	\$ 1,200	\$ 1,305	\$ 1,200
Kayu Kamper	0.5	\$ 570	\$ 575	\$ 285	\$ 287.5	\$ 285
Kayu Jati	3	\$ 350	\$ 300	\$ 1,050	\$ 900	\$ 900
Kayu Kapur	0.25	\$ 517	\$ 515	\$ 129.25	\$ 128.75	\$ 128.75
Kayu Sengon	7	\$ 80	\$ 95	\$ 560	\$ 665	\$ 560
TOTAL				\$ 4,074.25	\$ 4,036.25	\$ 3,823.75

Dengan kesesuaian penerapan akuntansi persediaan yang dilakukan oleh PT. WKPI terhadap prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan yang terdapat dalam SAK ETAP, maka perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan SAK ETAP. Sehingga informasi dari laporan keuangan dapat membantu pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dalam hal pengawasan efektivitas dari pengelolaan persediaan, agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan sehingga selalu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan mengenai dilakukannya evaluasi terhadap penerapan akuntansi persediaan yang didasarkan pada SAK

ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi persediaan pada PT. Wisnu Karya Putra Internasional sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian itu tercermin dari pengakuan, dan pengukuran persediaan PT. WKPI dengan prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan pada SAK ETAP.

PT. WKPI sebagai badan usaha yang tergolong sebagai usaha menengah dengan kegiatan produksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan usaha mikro dan usaha kecil, sehingga PT. WKPI menyadari pentingnya melakukan pencatatan akuntansi. Dengan melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar pencatatan yang diperuntukkan bagi perusahaan yang tergolong UMKM, maka PT. Wisnu Karya Putra Internasioanal dapat mengatur kegiatan produksi usahanya dengan baik, salah satunya yang menjadi bahasan kali ini adalah persediaan. Dengan adanya standar pencatatan untuk persediaan, maka perusahaan dapat menggunakan informasi yang relevan untuk pembuatan suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan sehingga persediaan yang dimiliki PT. WKPI dapat dikelola dengan baik.

Melalui pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku, PT. WKPI dapat mengatur agar persediaan yang dikelola tidak menimbulkan banyak biaya dalam pengelolaannya, serta menghindari terjadinya kekurangan persediaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan demikian PT. WKPI dapat meyakinkan masyarakat bahwa usaha yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga PT. WKPI dapat terus mengembangkan usahanya.

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan kepada PT. Wisnu Karya Putra Internasional, dalam penerapan pencatatan akuntansi pada akun-akun yang ada selain persediaan juga harus disesuaikan dengan SAK ETAP, karena untuk pencatatan beberapa akun dalam pencatatan akuntansi berdasarkan SAK ETAP berbeda dengan SAK Umum, sehingga perlu untuk disesuaikan agar laporan keuangan yang dibuat relevan dan menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk perusahaan sejenis maupun usaha yang tergolong kedalam UMKM, sebaiknya mengikuti standar pencatatan sesuai SAK ETAP agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga pihak manajemen dapat memperoleh informasi yang akurat guna mengetahui kinerja perusahaan serta untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan usaha agar dapat lebih mengembangkan usahanya. Selain itu SAK ETAP dibuat lebih sederhana dari Standar Akuntansi yang berlaku Umum (SAK Umum), sehingga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diaplikasikan oleh UMKM.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya melakukan evaluasi pada satu jenis akun saja, yaitu akun persediaan serta jenis usaha yang diteliti hanya salah satu dari jenis usaha yang tergolong kedalam UMKM. Data yang diperoleh peneliti sangat terbatas, hal ini dikarenakan perusahaan sedang dalam proses pengauditan sehingga tidak dapat mengakses seluruh data yang berkaitan dengan penelitian. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, sehingga diharapkan untuk

penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi akun-akun serta penyajian laporan keuangan pada jenis usaha lain, seperti perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa dengan skala mikro kecil dan menengah sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan SAK ETAP pada UMKM, dan nantinya dapat diketahui apakah UMKM yang ada di Indonesia telah melakukan pencatatan sesuai dengan SAK ETAP, serta manfaat apa yang diperoleh UMKM setelah menerapkan SAK ETAP.

REFERENSI

- Abdul Lumala. 2012. Accounting Practices and Profitability in Small and Medium Enterprises: Case Study: Tuskys Supermarket. Makerere University. Uganda.
- Asaolu, T. O. 2004. Evaluations of Performance of Cooperation Investment and Credit Society in Financing Small Scale Enterprises in Osun State, Nigeria. Ph.D Thesis Submitted to The Department of Management and Accounting, Faculty of Administration, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife.
- Auliyah Iim Ma'Riatul. 2012. Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo. Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Basir Syarief. 2010. Persiapan Penerapan PSAK ETAP. Dalam *Newsletter KAP Syarief Basir dan Rekan*, Edisi: Juli 2010. Jakarta.
- Bertoni Michele & Rosa De Bruno. 2010. The Evolution of Financial Reporting for Private Entities in the European Union. University of Trieste. Italy.
- Briciu Sorin, Groza Constantin, and Ganfalean Ioan. 2009. International Financial Reporting Standard (IFRS) Will Support Management Accounting System for Small and Medium Enterprise (SME). *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*. Hungary.

- European Commission (Enterprise and Industry Directorate-General). 2008. Final Report of the Expert Group: Accounting System for small enterprises- Recommendations and good Practices.
- Fatoki Olawale. 2012. An Investigation into the Financial Management Practices of New Micro-enterprises in South Africa. *J Soc Sci*, 33(2), pp: 179-188.
- Fitakhurrokhmah. 2013. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Malang Raya. Artikel Ilmiah Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- IAI. 2009. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.
- Kristanto Eri. 2011. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada UMKM Pengrajin Rotan di Desa Trangsang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kureshi N. and Sajid A. 2009. An Empirical Study of Supplier Development Practices in a Developing Economy – SMEs Perspective, *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 6(6), pp: 255-268.
- Lumban Toruan, Rico. 2008. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK NO. 14 Pada PT. Electronic City Cab. Medan. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Maseko, Manyani. 2011. Accounting practices of SMEs in Zimbabwe: An investigative study of record keeping for performance measurement (A case study of Bindura). *Journal of Accounting and Tax*, 3(8), pp: 171-181.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mitchell, and Reid. 2000. Editorial problems, challenges and opportunities: the small business as a setting for management accounting research. *Management Accounting Research*, vol. 11, pp: 385–390.
- Narsa, Widodo Agus, dan Kurnianto Sigit. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Dalam *Majalah Ekonomi*, 22(3): h: 204-214.

- Padachi K. 2012. Factors Affecting the Adoption of Formal Accounting Systems by SMEs Factors Affecting the Adoption of Formal Accounting Systems by SMEs. *Business and Economics Journal*, Vol. 2012: BEJ-67.
- PT. Wisnu Karya Putra Internasional. 2012. Manual Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Denpasar.
- Rajeev. 2008. Inventory management in small and medium enterprises: A study of machine tool enterprises in Bangalore. *Management Research News*, 31(9), pp: 659.
- Sariningtyas Pratiwi dan Diah W. Tituk. 2011. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah. Dalam *JAKI*, 1(1): h: 90-101.
- Setiady Marry. 2012. Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP: Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya. Dalam *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1): h: 79-83.
- Sian & Roberts. 2009. UK small owner-managed businesses: accounting and financial reporting needs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 16(2), pp: 289 – 305.
- Simanjuntak, Pentus. 2003. Analisa Terhadap Penerapan PSAK NO. 14 Pada PT. Nanyang Indokarya Lubuk Pakam. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Strouhal, Mullerova, Cardova, and Pasekova. 2009. National and International Financial Reporting Rules: Testing the Compatibility of Czech Reporting from the SMEs Perspective. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 12(6), pp: 620-629.
- Suhairi. 2004. Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage and Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries. Disertasi, USM. Malaysia.
- Tambunan Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Edisi ke satu. LP3ES: Jakarta.
- Tanuraga Jevon. 2012. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT TDMN. Dalam *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(3): h: 77-81.
- Tim Implementasi IFRS. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Riau.

Van Wyk H.A, Rossouw J. 2009. IFRS for SMEs in South Africa: a giant leap for accounting, but too big for smaller entities in general, *Meditari Accountancy Research*, 17 (1), pp: 99 – 116.